

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara berkembang seperti Indonesia, tolak ukur kesuksesan dalam pencapaian pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Dalam pencapaian pembangunan manusia tidak terlepas dari berapa besarnya pengaruh kualitas manusia dalam suatu negara. Indikator yang dapat mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi di suatu negara atau daerah diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran pembangunan yang menggunakan pengukuran dengan PDB nasional dan PDRB regional untuk menggambarkan suatu pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu dibutuhkanlah parameter lain yang dapat diukur dengan lebih menyeluruh yang dapat menggambarkan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yaitu derajat pembangunan ekonomi. Maka dari itu, pembangunan ekonomi sendiri adalah berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan 2002).

Keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia dapat diukur dengan parameter yang populer digunakan saat ini yaitu dengan Indeks Pembangunan

Manusia atau *Human Development Indeks* (HDI) yang telah disepakati oleh dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP). Besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan perlu untuk diteliti oleh beberapa faktor yang secara hipotesis dapat berpengaruh terhadap naik turunnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1. 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017

Kab/Kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Bogor	67,77	68,32	69,13
Sukabumi	64,44	65,13	65,49
Cianjur	62,42	62,92	63,70
Bandung	70,05	70,69	71,02
Garut	63,21	63,64	64,52
Tasikmalaya	63,17	63,57	64,14
Ciamis	68,02	68,45	68,87
Kuningan	67,19	67,51	67,78
Cirebon	66,07	66,70	67,39
Majalengka	64,75	65,25	65,92
Sumedang	69,29	69,45	70,07
Indramayu	64,36	64,78	65,58
Subang	66,52	67,14	67,73
Purwakarta	67,84	68,56	69,28
Karawang	67,66	68,19	69,17
Bekasi	71,19	71,83	72,63
Bandung Barat	65,23	65,81	66,63
Pangandaran	65,62	65,79	66,60
Kota Bogor	73,65	74,50	75,16
Kota Sukabumi	71,84	72,33	73,03
Kota Bandung	79,67	80,13	80,31
Kota Cirebon	73,34	73,70	74,00
Kota Bekasi	79,63	79,95	80,30
Kota Depok	79,11	79,60	79,83
Kota Cimahi	76,42	76,69	76,95
Kota Tasikmalaya	69,99	70,58	71,51
Kota Banjar	69,31	70,09	70,79
JAWA BARAT	69,50	70,05	70,69

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terdapat wilayah dengan variasi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peringkatnya, tetapi dapat juga dibandingkan dengan tingkat kemajuan melalui presentase pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah dicapai dari sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi pada tahun 2017 yang disandang oleh Kota Bandung dengan nilai presentase 80,31. Posisi selanjutnya yaitu disandang oleh Kota Bekasi pada tahun 2017 dengan nilai presentase 80,30. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai presentase terendah terjadi di Kabupaten Garut pada tahun 2013 dengan nilai presentase yaitu 61,67. Secara umum gambaran perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung dengan Kabupaten Garut menjadi perbandingan yang jompong antara kedua daerah tersebut. Kejadian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk kedepannya harus dipikirkan dan diperhatikan upaya-upaya yang lebih efektif dan intensif dalam hal untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya diduga gini ratio dapat mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Todaro dalam penelitiannya (Wijaya 2017), pendekatan yang sederhana dalam permasalahan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan yaitu dengan menggunakan kurva kerangka kemungkinan produksi. Untuk menggambarkan permasalahannya, produksi yang

terdapat pada suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang yaitu barang yang pertama atau barang pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan serta barang yang kedua adalah barang mewah.

Dikutip dalam (Kompas.com) walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 dan Indeks Gini Rasio di Indonesia dapat diturunkan dari 0,414 menjadi 0,393 pemerintah akan terus menekankan ketimpangan pendapatan yang tidak dapat dirasakan oleh setiap wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah terkait dalam menangani kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya dalam masalah stunting (kurang gizi). Stunting atau gizi buruk dipandang akan menaikkan tingkat kemiskinan sehingga permasalahan ini harus diturunkan.
2. Terdapatnya bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga yang kurang mampu belum tersentuh bantuan karena kurangnya dalam hal sinkronisasi data.
3. Pemerintah daerah harus dapat memprioritaskan untuk pendidikan vokasi agar dapat mengatasi persoalan pengangguran. Karena tenaga kerja yang memiliki keterampilan akan lebih mudah diserap oleh pasar tenaga kerja.
4. Menurunkan angka ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar

pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

5. Menciptakan wirausaha secara massal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat juga terdapat kendala yaitu dengan tidak terpenuhinya pemenuhan ruang kelas baru, masih banyaknya sekolah yang menginduk ke sekolah lain sehingga masalah putus sekolah yang masih tinggi. Selain itu, terdapat juga banyak kasus seperti anak-anak yang ingin masuk ke sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta yang berakibat sepi peminat dari peserta didik yang ingin masuk ke sekolah swasta karena dijadikannya sekolah swasta menjadi pilihan kedua oleh peserta didik. Adapaun terkait dengan pengalihan kelola tingkat SMA dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi ini belum mampu meningkatkan atau mempercepat presentase Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat karena pengalihan tata kelola sekolah belum cukup lama. Sehingga dampaknya belum terasa atau belum mempengaruhi secara signifikan. Faktor itulah yang merupakan salah satu penyebab menurunnya angka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat.

Selain masalah dalam hal ketimpangan distribusi pendapatan, pada saat ini Provinsi Jawa Barat masih menghadapi masalah dalam hal pembangunan yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, dalam hal ini masalahnya di akibatkan oleh berbagai faktor seperti dalam bidang pendidikan atau *educational achievement* yakni kurangnya tingkat pendidikan pada masyarakat, dalam bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup yang masih rendah dan gizi buruk atau

stunting yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga menggunakan variabel lain yang di luar indikator IPM, yaitu dengan menggunakan variabel gini ratio, jumlah penduduk di wilayah provinsi Jawa Barat, anggaran pemerintah daerah bidang kesehatan, dan anggaran pemerintah daerah bidang pendidikan.

Penelitian ini juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan penyumbang ekonomi terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta (16,32%), Jawa Timur (14,68%), Jawa Barat (14,30%). Tidak hanya itu, jumlah penduduk di Jawa Barat adalah terbesar di Indonesia sehingga merupakan potensi yang baik sebagai faktor produksi maupun pasar. Dalam sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat ditunjang dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berkualitas guna mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

Sebagaimana yang telah diuraikan permasalahan diatas tentang pembangunan manusia alangkah baiknya kita sebagai umat manusia untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya agar berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Adapun ayat yang

berkaitan tentang pembangunan manusia yaitu tercantum dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

كَثِيرًا اللَّهُ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهُ يَرْجُو كَان لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهُ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَان لَفَدُ

“Laqad kāna lakum fī rasūlillāhi uswatun ḥasanatul limang kāna yarjullāha wal-yaumal-ākhirā wa ḥakarallāha kaṣīrā”

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Isi kandungan dari ayat diatas menyatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan sebagai suri teladan yang baik yang selalu memperbaiki kualitas dirinya. Maka dari itu, patutlah kita sebagai umatnya untuk mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan selalu memperbaharui kualitas diri untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat?

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya adalah :

1. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Deret waktu (*time series*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013 – 2017.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gini Ratio, Jumlah Penduduk, Belanja Kesehatan, dan Belanja Pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan penelitian yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat adalah, sebagai berikut :

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan tambahan informasi-informasi pada instansi terkait.
3. Dapat memberikan informasi terhadap peneliti lain sebagai bahan referensi dalam penelitian mengenai Determinasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.
4. Penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para *stakeholder* tentang Determinasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat.